

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak.

Akuntansi • Keberlanjutan

Teori, Prinsip, Konsep, dan Praktik
Menuju Target Net Zero Emission



Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak.

Akuntansi

• Keberlanjutan

Teori, Prinsip, Konsep, dan Praktik
Menuju Target Net Zero Emission



INSIGHT
PUSTAKA

AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Teori, Prinsip, Konsep, dan Praktik Menuju Target Net Zero Emission

Penulis:

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Insight Pustaka Nusa Utama

Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

Telp: 085150867290 | 087847074694

Email: insightpustaka@gmail.com

Web: www.insightpustaka.com

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2026

Editor: Prof. Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, SE., Ak., M.Si.

Perancang sampul: Syuhada Creative

Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7569-89-9

x + 248 hlm; 15,5x23 cm.

©Juni 2026



Prakata

Perkembangan dunia usaha dan profesi akuntansi tidak lagi dapat dilepaskan dari tuntutan keberlanjutan. Perusahaan diharapkan tidak hanya mencatat kinerja keuangan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Transformasi ini mendorong lahirnya akuntansi keberlanjutan sebagai pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengukuran, pelaporan, serta pengambilan keputusan. Kebutuhan terhadap sumber belajar yang sistematis dan kontekstual menjadi semakin penting, khususnya bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami praktik akuntansi modern yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan landasan konseptual sekaligus pemahaman praktis mengenai akuntansi keberlanjutan. Pembahasan dimulai dari evolusi pemikiran akuntansi menuju *sustainability accounting*, konsep pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan global, hingga kerangka *triple bottom line* yang menempatkan *people*, *planet*, dan *profit* sebagai satu kesatuan kinerja. Selanjutnya diuraikan teori-teori yang melandasi praktik pelaporan keberlanjutan seperti *stakeholder theory*, *legitimacy theory*, dan *institutional theory*, disertai pemahaman tentang akuntabilitas sosial dan lingkungan dalam organisasi.

Pembaca juga diajak memahami standar dan praktik pelaporan keberlanjutan yang berkembang secara internasional dan nasional, termasuk indikator kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengukuran dampak, serta integrasi laporan keberlanjutan dengan laporan keuangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis mengenai peran akuntan sebagai agen perubahan yang mendorong organisasi menuju praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Penyusunan buku ajar ini diarahkan agar mudah digunakan dalam perkuliahan maupun pembelajaran mandiri, dengan bahasa yang sistematis dan contoh yang relevan dengan konteks Indonesia serta perkembangan global. Penulis berharap kehadiran buku ajar akuntansi keberlanjutan ini dapat membantu mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam praktik akuntansi dan pengelolaan organisasi.



Daftar Isi

iii Prakata

v Daftar Isi

Bab 1

1—LANDASAN KONSEPTUAL AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

1—Evolusi Akuntansi ke Akuntansi Keberlanjutan

5—*Triple Bottom Line* dalam Pelaporan Sosial dan Lingkungan

11—Isu Sosial dan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan

18—Diskusi Akademik dan Analisis Kolaboratif

Bab 2

23—TEORI *STAKEHOLDER*, LEGITIMASI, DAN PENENTUAN ISU MATERIAL

23—*Stakeholder Theory* dan *Legitimacy Theory* dalam Organisasi

27—Identifikasi Pemangku Kepentingan Utama
dalam Kasus Organisasi

32—Teori Legitimasi dan Pengungkapan Sosial-Lingkungan

39—Perumusan Isu Material Berbasis Perspektif Teoretis

Bab 3

45—EVALUASI KESESUAIAN LAPORAN TERHADAP STANDAR GRI DAN ISSB

- 45—Identifikasi Ketidaksesuaian Laporan dengan Standar GRI dan ISSB
 - 51—Kesenjangan (*Gap Analysis*) Pelaporan Keberlanjutan
 - 53—Perbandingan Kesesuaian Standar
 - 57—Kolaborasi Tim dalam Evaluasi Pelaporan

Bab 4

61—PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

- 61—Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Berbasis *Gap Analysis*
- 67—Keterkaitan Rekomendasi dengan Prinsip GRI, ISSB, dan <IR>
 - 73—Penyajian Rekomendasi secara Sistematis dan Profesional
- 78—Rekomendasi Berbasis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bab 5

85—KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL

- 85—Struktur dan Komponen Utama GRI *Standards*
 - 89—Ruang Lingkup IFRS S1 dan IFRS S2
- 94—Perbandingan Konsep Materialitas dalam GRI dan ISSB
 - 98—Kerangka Regulasi Pelaporan Keberlanjutan

Bab 6

105—INTEGRATED REPORTING DAN PENCIPTAAN NILAI BERKELANJUTAN

- 105—Konsep *Value Creation* dalam
Integrated Reporting
- 110—Enam Kapital dalam Konteks Organisasi
- 115—Keterkaitan <IR>, GRI, dan ISSB
- 119—Pemetaan Konseptual Kerangka Regulasi Keberlanjutan

Bab 7

125—TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BERBASIS ESG

- 125—Penyusunan Laporan Keberlanjutan Berbasis Aspek ESG
- 131—Penggunaan Indikator dan Terminologi GRI dan ISSB
- 135—Penyajian Data Sistematis Terintegrasi Dokumentasi
- 139—Ketepatan Teknis dalam Format dan Struktur Pelaporan

Bab 8

143—COMPLIANCE REVIEW DAN GAP ANALYSIS PELAPORAN

- 143—Identifikasi Ketidaksesuaian Laporan terhadap Standar
- 147—Penyusunan Tabel *Compliance Review*
- 151—Kesenjangan (*Gap Analysis*) Pelaporan
- 156—Rekomendasi Teknis Berbasis
Hasil Evaluasi

Bab 9

163—PERMASALAHAN SUBSTANTIF DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN

- 163—Identifikasi Permasalahan Substantif dalam Laporan Keberlanjutan
- 167—Mengklasifikasikan Jenis Permasalahan
- 170—Pengungkapan Berbasis *Stakeholder* dan *Legitimacy Theory*
- 173—Penyusunan Analisis Awal secara Sistematis

Bab 10

179—METODE EVALUASI DAN *CONTENT ANALYSIS* LAPORAN KEBERLANJUTAN

- 179—Kerangka Sistematis untuk Evaluasi Laporan
- 184—Penerapan Teknik *Content Analysis*
- 188—Argumentasi Kritis Berbasis Data dan Referensi Ilmiah
- 192—Penarikan Kesimpulan Logis

Bab 11

197—PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAPORAN ESG

- 197—Peran Teknologi Informasi dalam Pelaporan Keberlanjutan
- 201—Kebutuhan Data ESG Berbasis Sistem Informasi

Bab 12

207—TANTANGAN DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI KEBERLANJUTAN

207—Tantangan Implementasi Teknologi dalam Pelaporan Keberlanjutan

212—Integrasi Sistem Informasi Keuangan dan Non-Keuangan

Bab 13

217—KOMPONEN DAN *DISCLOSURE MAPPING* LAPORAN KEBERLANJUTAN

217—Komponen Wajib Laporan Keberlanjutan menurut GRI dan ISSB

222—*Disclosure Mapping* antara Isu Material dan Standar Pengungkapan

225—Penyusunan Laporan Keberlanjutan secara Teknis dan Sistematis

Bab 14

231—PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BERBASIS STANDAR GLOBAL

231—Penyusunan Laporan secara Sistematis dan Terstruktur

235—Dasar Standar GRI dan ISSB dalam Penyusunan Laporan

241—Daftar Pustaka



Akuntansi

- Keberlanjutan



Bab 1

LANDASAN KONSEPTUAL AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Evolusi Akuntansi ke Akuntansi Keberlanjutan

Perkembangan akuntansi tidak terlepas dari dinamika kebutuhan masyarakat, organisasi, serta perubahan lingkungan ekonomi global. Pada tahap awal, akuntansi berfungsi utama sebagai alat pencatatan transaksi keuangan untuk kepentingan pemilik modal dan kreditor. Fokus utama akuntansi tradisional berada pada penyusunan laporan keuangan historis yang menilai kinerja organisasi berdasarkan profitabilitas, likuiditas, serta solvabilitas (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Orientasi ini mencerminkan paradigma ekonomi klasik yang menempatkan perusahaan sebagai entitas pencipta nilai finansial semata.

Memasuki dekade 1970–1990-an, kritik terhadap keterbatasan akuntansi konvensional mulai menguat seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas bisnis. Perusahaan tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar (Gray, Owen, & Adams, 1996). Dalam periode ini berkembang konsep social accounting serta environmental accounting,

yang berupaya memasukkan informasi non-keuangan seperti emisi limbah, keselamatan kerja, kesejahteraan masyarakat, hingga konservasi sumber daya alam ke dalam pelaporan perusahaan (Mathews, 1997).

Selanjutnya, konsep Triple Bottom Line yang diperkenalkan oleh John Elkington menandai pergeseran penting menuju akuntansi keberlanjutan. Triple Bottom Line menekankan bahwa keberhasilan organisasi harus diukur melalui tiga dimensi utama: profit (kinerja ekonomi), people (dampak sosial), serta planet (dampak lingkungan) (Elkington, 1997). Pendekatan ini memperluas perspektif akuntansi dari sekadar penciptaan nilai finansial menjadi penciptaan nilai berkelanjutan. Organisasi didorong untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas ekonomi global.

Pada awal abad ke-21, globalisasi, perubahan iklim, krisis energi, serta tekanan dari investor etis mempercepat transformasi menuju akuntansi keberlanjutan. Berbagai inisiatif standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI), International Sustainability Standards Board (ISSB), serta Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) mendorong integrasi pelaporan sosial, lingkungan, serta tata kelola ke dalam sistem akuntansi perusahaan (GRI, 2021; IFRS Foundation, 2023). Standar ini membantu organisasi menyajikan informasi ESG secara sistematis, terukur, serta dapat dibandingkan antar entitas.

Akuntansi keberlanjutan juga dipengaruhi oleh perkembangan teori dalam ilmu sosial, seperti *stakeholder theory*, *legitimacy theory*, serta *institutional theory*. *Stakeholder theory* menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak seperti karyawan, masyarakat, pemerintah, investor, serta lingkungan (Freeman, 1984). *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa perusahaan berusaha mempertahankan legitimasi sosial melalui pengungkapan tanggung jawab sosial serta lingkungan (Suchman, 1995). *Institutional Theory* menunjukkan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan berkembang karena tekanan regulasi, norma industri, serta ekspektasi masyarakat (DiMaggio & Powell, 1983). Ketiga perspektif

Bab 2

TEORI *STAKEHOLDER*, LEGITIMASI, DAN PENENTUAN ISU MATERIAL

Stakeholder Theory dan *Legitimacy Theory* dalam Organisasi

Teori *stakeholder* dan teori legitimasi merupakan dua perspektif utama dalam kajian akuntansi sosial serta pelaporan keberlanjutan yang menjelaskan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan sosialnya. Kedua teori tersebut memberikan landasan konseptual dalam memahami mengapa perusahaan perlu mengungkapkan informasi sosial serta lingkungan, serta bagaimana pengungkapan tersebut berperan dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Teori *stakeholder* memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara dinamis dengan berbagai pihak di sekitarnya. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga oleh kemampuannya membangun serta memelihara hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi karyawan, masyarakat, pemerintah, pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, media, hingga komunitas lokal.

Secara konseptual, teori *stakeholder* berkembang dari pemikiran bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral serta strategis terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitasnya. Tidak seperti pendekatan klasik yang berorientasi pada shareholder, teori ini menempatkan *stakeholder* sebagai pusat perhatian manajemen. Artinya, pengambilan keputusan tidak lagi semata-mata mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap kelompok lain.

Daud dan Abrar (2008) menekankan bahwa *stakeholder* menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis informasi yang akan diungkapkan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan investor, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat, regulator, serta pihak lain yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ghozali dan Chariri (2007:409) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi demi kepentingannya sendiri, melainkan harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*.

Anthony dan Nanik (2015: 47) menambahkan bahwa teori *stakeholder* menitikberatkan pada kemampuan manajemen dalam mengelola harapan para pemangku kepentingan. Manajemen dituntut untuk memahami kebutuhan, ekspektasi, serta potensi konflik antar *stakeholder*. Dalam praktiknya, pengelolaan tersebut dilakukan melalui komunikasi yang transparan, kebijakan yang inklusif, serta penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori *stakeholder* memiliki dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif serta pendekatan strategis.

1. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memperhatikan hak serta kepentingan *stakeholder*. Setiap kelompok memiliki hak yang sah atas tindakan perusahaan, sehingga organisasi harus bertindak secara etis dan adil. Dalam perspektif ini, pengungkapan CSR dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.



Akuntansi

- Keberlanjutan

Bab 3

EVALUASI KESESUAIAN LAPORAN TERHADAP STANDAR GRI DAN ISSB

Identifikasi Ketidaksesuaian Laporan dengan Standar GRI dan ISSB

Identifikasi ketidaksesuaian laporan keberlanjutan dengan standar global merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan organisasi memiliki kualitas, kredibilitas, serta akuntabilitas yang memadai. Laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menunjukkan tanggung jawab organisasi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, kesesuaian laporan dengan standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan International Sustainability Standards Board (ISSB) menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Menurut Jeffrey Unerman, Jan Bebbington, dan Brendan O'Dwyer (2010), laporan keberlanjutan yang tidak sesuai dengan standar dapat menimbulkan berbagai risiko bagi organisasi. Risiko tersebut antara lain berupa menurunnya reputasi perusahaan, terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan, serta berkurangnya legitimasi perusahaan di mata publik. Dalam konteks ini, laporan

keberlanjutan yang disusun secara tidak sistematis atau tidak mengikuti standar yang diakui secara global dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi kurang dapat dipercaya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan identifikasi secara sistematis terhadap berbagai potensi ketidaksesuaian dalam laporan keberlanjutan agar proses pelaporan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang sering ditemukan dalam laporan keberlanjutan adalah ketidaksesuaian dalam pengungkapan materialitas. Prinsip materialitas merupakan salah satu prinsip utama dalam standar GRI yang mengharuskan organisasi mengidentifikasi dan mengungkapkan isu-isu yang paling signifikan bagi pemangku kepentingan serta memiliki dampak besar terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam standar GRI, organisasi diwajibkan menjelaskan bagaimana proses identifikasi isu material dilakukan, termasuk metode analisis dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses tersebut (GRI, 2021).

Sementara itu, ISSB juga menekankan konsep materialitas, tetapi lebih berfokus pada materialitas finansial yang berkaitan dengan risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan di masa depan. Pendekatan ini menekankan bahwa isu keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kinerja keuangan dan stabilitas bisnis perusahaan (IFRS Foundation, 2023).

Ketidaksesuaian dalam aspek materialitas biasanya terjadi ketika laporan keberlanjutan tidak menjelaskan secara jelas proses penentuan isu material. Misalnya, laporan hanya mencantumkan beberapa isu tanpa menjelaskan bagaimana isu tersebut dipilih atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan dalam proses analisis. Selain itu, ketidaksesuaian juga dapat muncul ketika isu yang dilaporkan tidak relevan dengan dampak utama organisasi. Menurut Carol A. Adams (2017), kegagalan dalam mengidentifikasi isu material sering menyebabkan laporan keberlanjutan hanya bersifat simbolis atau sekadar memenuhi kewajiban administratif

Bab 4

PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Berbasis *Gap Analysis*

Penyusunan rekomendasi perbaikan pelaporan keberlanjutan berbasis *gap analysis* merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus memperkecil kesenjangan antara praktik pelaporan yang telah dijalankan organisasi dengan standar, pedoman, serta praktik terbaik yang berlaku secara global. Dalam praktiknya, pelaporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi perusahaan kepada pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas organisasi terhadap dampak kegiatan operasionalnya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, kualitas pelaporan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi organisasi.

Kesenjangan dalam pelaporan keberlanjutan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa organisasi masih menghadapi ketidaklengkapan pengungkapan informasi, lemahnya kualitas data yang disajikan, tidak adanya konsistensi antarperiode pelaporan, serta belum terintegrasinya isu keberlanjutan ke dalam strategi organisasi secara menyeluruh. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan masih belum sepenuhnya memenuhi standar global yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *gap analysis* menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi kondisi tersebut secara sistematis.

Secara konseptual, pelaporan keberlanjutan yang berkualitas harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Prinsip-prinsip tersebut meliputi materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, serta kelengkapan informasi. Prinsip materialitas menekankan bahwa organisasi harus mengungkapkan isu-isu yang paling signifikan bagi keberlanjutan organisasi dan pemangku kepentingannya. Prinsip keterlibatan pemangku kepentingan menuntut organisasi untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses identifikasi dan penilaian isu keberlanjutan. Sementara itu, prinsip konteks keberlanjutan menekankan bahwa kinerja organisasi harus dipahami dalam konteks pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Prinsip kelengkapan menegaskan bahwa informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi secara menyeluruh (GRI, 2021).

Ketika suatu organisasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka terdapat jarak antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang diharapkan. Jarak inilah yang kemudian diidentifikasi melalui proses *gap analysis*. Dalam literatur akademik, pendekatan ini dipandang sebagai metode sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana praktik akuntansi keberlanjutan telah sesuai dengan tuntutan normatif masyarakat, regulasi, serta standar internasional. Menurut Jeffrey Unerman, Jan Bebbington, dan Brendan O'Dwyer (2010), evaluasi kesenjangan dalam pelaporan keberlanjutan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas organisasi. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Mark C. Suchman (1995), yang menyatakan bahwa organisasi harus menjaga kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut masyarakat dengan aktivitas yang dijalankan agar tetap memperoleh dukungan sosial.

Bab 5

KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL

Struktur dan Komponen Utama GRI *Standards*

Globalisasi ekonomi serta meningkatnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan telah mendorong organisasi untuk tidak hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Dalam konteks tersebut, pelaporan keberlanjutan menjadi salah satu instrumen penting untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Salah satu kerangka kerja yang paling banyak digunakan secara global dalam pelaporan keberlanjutan adalah Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Standar ini dikembangkan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara sistematis dan dapat dibandingkan secara internasional (GRI, 2021).

GRI Standards disusun dengan pendekatan modular yang memungkinkan organisasi menggunakan standar sesuai dengan kebutuhan dan topik keberlanjutan yang relevan dengan aktivitas mereka. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi berbagai jenis organisasi, baik perusahaan,

lembaga pemerintah, maupun organisasi nirlaba, untuk menyusun laporan keberlanjutan yang komprehensif dan transparan. Struktur GRI Standards secara umum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Universal Standards, Sector Standards, dan Topic Standards. Ketiga komponen tersebut saling terintegrasi dan membentuk kerangka pelaporan yang sistematis sehingga organisasi dapat mengungkapkan dampak keberlanjutan secara lebih terstruktur dan relevan (Bebbington, Unerman, & O'Dwyer, 2014).

Komponen pertama dalam struktur GRI Standards adalah Universal Standards. Standar ini merupakan fondasi utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan karena berlaku untuk semua organisasi tanpa memandang ukuran, sektor industri, maupun lokasi geografis. Universal Standards memberikan prinsip dasar, konsep pelaporan, serta persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh organisasi ketika menggunakan GRI sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan. Standar ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang memastikan bahwa laporan keberlanjutan disusun secara konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (GRI, 2021).

Universal Standards terdiri atas tiga standar utama, yaitu GRI 1: Foundation, GRI 2: General Disclosures, dan GRI 3: Material Topics. GRI 1 menjelaskan dasar-dasar penggunaan standar GRI serta prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Prinsip tersebut meliputi akurasi, keseimbangan, kejelasan, komparabilitas, keandalan, serta ketepatan waktu dalam penyampaian informasi keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Hahn & Kühnen, 2013).

Sementara itu, GRI 2: General Disclosures berfokus pada pengungkapan informasi umum mengenai organisasi. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti profil organisasi, struktur tata kelola, strategi keberlanjutan, kebijakan perusahaan, serta praktik operasional yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui pengungkapan ini,



Akuntansi

- Keberlanjutan

Bab 6

INTEGRATED REPORTING DAN PENCIPTAAN NILAI BERKELANJUTAN

Konsep *Value Creation* dalam *Integrated Reporting*

Konsep *value creation* atau penciptaan nilai merupakan salah satu elemen utama dalam kerangka Integrated Reporting (<IR>). Dalam pendekatan ini, organisasi tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas yang berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial semata, melainkan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi berbagai pemangku kepentingan. Penciptaan nilai tersebut mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan dalam aktivitas bisnis organisasi. Oleh karena itu, Integrated Reporting menekankan pentingnya penyajian informasi yang mampu menggambarkan bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek organisasi berkontribusi terhadap penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (International Integrated Reporting Council, 2013).

Dalam perkembangan praktik pelaporan korporasi modern, konsep penciptaan nilai menjadi semakin penting karena organisasi beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham,

tetapi juga harus memperhatikan dampak aktivitasnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, laporan terintegrasi hadir sebagai bentuk evolusi dari sistem pelaporan tradisional yang sebelumnya lebih berfokus pada informasi keuangan. Pendekatan ini menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan secara terpadu sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja dan keberlanjutan organisasi (Eccles & Krzus, 2015).

Dalam kerangka Integrated Reporting, penciptaan nilai dipahami sebagai suatu proses yang terjadi melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dan hubungan yang dimiliki organisasi. Sumber daya tersebut kemudian diolah melalui model bisnis perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Proses ini menunjukkan bahwa nilai organisasi tidak hanya berasal dari aktivitas produksi atau keuntungan finansial semata, tetapi juga dari bagaimana organisasi mampu mengelola sumber daya secara efektif serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan lingkungan eksternal (Bek-Gaik, 2023).

Model penciptaan nilai dalam Integrated Reporting umumnya digambarkan sebagai suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu input, aktivitas bisnis, output, dan outcome. Input merujuk pada berbagai sumber daya yang digunakan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sumber daya tersebut kemudian diproses melalui berbagai kegiatan operasional yang menjadi bagian dari model bisnis perusahaan. Hasil dari proses tersebut berupa output dalam bentuk produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Selain itu, terdapat pula outcome yang menggambarkan dampak lebih luas dari aktivitas organisasi terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, penciptaan nilai tidak hanya berfokus pada hasil langsung dari kegiatan bisnis, tetapi juga mencakup dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh organisasi (IIRC, 2013).

Salah satu aspek penting dalam konsep penciptaan nilai dalam Integrated Reporting adalah penggunaan kerangka enam jenis modal (six capitals). Kerangka ini menjelaskan bahwa organisasi menciptakan nilai



Akuntansi

- Keberlanjutan

Bab 7

TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BERBASIS ESG

Penyusunan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Aspek ESG

Penyusunan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan salah satu praktik penting dalam manajemen modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab organisasi terhadap dampak aktivitasnya terhadap lingkungan, masyarakat, serta tata kelola perusahaan. Laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menilai kinerja keberlanjutan organisasi secara komprehensif. Dalam konteks global saat ini, ESG telah menjadi kerangka kerja yang banyak digunakan dalam pelaporan keberlanjutan karena mampu mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam satu sistem pelaporan yang sistematis dan terukur (Leal Filho et al., 2025; Setiadi et al., 2023).

Secara konseptual, laporan keberlanjutan merupakan proses pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban organisasi terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan operasionalnya. Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan pelaporan keberlanjutan

sebagai mekanisme yang memungkinkan organisasi untuk menyampaikan kinerja keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan secara transparan dan sistematis. Melalui laporan ini, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan informasi yang relevan bagi investor, regulator, serta masyarakat luas (Setiadi et al., 2023; Nuraeni et al., 2023).

Dalam perkembangannya, konsep pelaporan keberlanjutan semakin terintegrasi dengan pendekatan ESG. ESG menjadi kerangka utama dalam menilai keberlanjutan perusahaan karena mencakup tiga dimensi utama yang memengaruhi kinerja jangka panjang organisasi. Aspek *environmental* berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan, seperti pengelolaan emisi, penggunaan energi, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah. Aspek *social* mencakup hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat, dan konsumen, termasuk isu hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, aspek *governance* berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang mencakup transparansi, integritas manajemen, struktur dewan direksi, serta kepatuhan terhadap regulasi (Fagbemi et al., 2025).

Penyusunan laporan keberlanjutan berbasis ESG didasarkan pada prinsip bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur melalui kinerja finansial, tetapi juga melalui dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan harus mampu menggambarkan bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keberlanjutan biasanya mengikuti standar internasional seperti GRI Standards, Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), dan IFRS Sustainability Disclosure Standards. Standar-standar tersebut memberikan pedoman mengenai struktur, indikator, serta metode pengungkapan informasi keberlanjutan sehingga laporan yang dihasilkan memiliki tingkat konsistensi dan keterbandingan yang tinggi (Fagbemi et al., 2025).

Bab 8

COMPLIANCE REVIEW DAN GAP ANALYSIS PELAPORAN

Identifikasi Ketidaksesuaian Laporan terhadap Standar

Identifikasi ketidaksesuaian laporan terhadap standar merupakan tahapan penting dalam proses *compliance review* dan *gap analysis* pelaporan organisasi. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana laporan yang disusun telah memenuhi standar, pedoman, maupun regulasi yang berlaku. Dalam konteks pelaporan organisasi modern, khususnya pelaporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, kesesuaian terhadap standar menjadi faktor penting yang menentukan kualitas, kredibilitas, dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan yang dihasilkan. Laporan yang tidak sesuai dengan standar dapat menimbulkan kesalahpahaman informasi, menurunkan tingkat transparansi organisasi, serta berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan hukum bagi organisasi tersebut (Ghozali & Chariri, 2014).

Secara konseptual, ketidaksesuaian laporan atau *non-compliance* dapat dipahami sebagai kondisi ketika isi laporan, struktur penyajian, maupun metode pengungkapan informasi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar pelaporan. Standar tersebut dapat berupa

standar akuntansi keuangan, standar pelaporan keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative (GRI), maupun regulasi nasional yang mengatur kewajiban pelaporan organisasi. Dalam konteks akuntansi dan pelaporan organisasi, standar berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa informasi yang disajikan memiliki kualitas yang dapat dibandingkan, dapat dipercaya, dan relevan bagi para pengguna laporan (Deegan, 2014).

Ketidaksesuaian dalam pelaporan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang sering ditemukan adalah ketidaksesuaian dalam struktur laporan. Struktur laporan merupakan kerangka penyajian informasi yang telah ditetapkan oleh standar tertentu. Dalam pelaporan keberlanjutan misalnya, laporan biasanya harus memuat informasi mengenai profil organisasi, tata kelola perusahaan, strategi keberlanjutan, serta indikator kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apabila laporan tidak mengikuti sistematika yang telah ditetapkan, maka informasi yang disajikan menjadi kurang sistematis dan sulit dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, kesesuaian struktur laporan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi pelaporan (GRI, 2021).

Selain struktur laporan, ketidaksesuaian juga dapat terjadi pada aspek pengungkapan informasi. Pengungkapan informasi merupakan elemen penting dalam pelaporan karena berkaitan dengan transparansi organisasi terhadap para pemangku kepentingan. Dalam standar pelaporan tertentu, organisasi diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tertentu yang dianggap penting bagi pengguna laporan, seperti kebijakan lingkungan, praktik ketenagakerjaan, dampak sosial, serta kinerja ekonomi organisasi. Ketika informasi tersebut tidak diungkapkan secara lengkap atau bahkan tidak disajikan sama sekali, maka laporan dapat dikategorikan tidak sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku (Unerman, Bebbington, & O'Dwyer, 2010).

Selain aspek pengungkapan, kualitas data yang disajikan dalam laporan juga menjadi faktor penting dalam menilai kesesuaian laporan terhadap standar. Informasi yang disampaikan dalam laporan harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta didukung oleh metode pengukuran yang jelas



Akuntansi

- Keberlanjutan

Bab 9

PERMASALAHAN SUBSTANTIF DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN

Identifikasi Permasalahan Substantif dalam Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh organisasi untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, perusahaan diharapkan mampu menunjukkan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjelaskan dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks tata kelola perusahaan modern, laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya penyusunan laporan keberlanjutan sering menghadapi berbagai permasalahan substantif yang memengaruhi kualitas, transparansi, serta kredibilitas informasi yang disampaikan.

Salah satu permasalahan utama dalam laporan keberlanjutan adalah kesulitan dalam menentukan isu material atau topik yang paling relevan untuk diungkapkan. Konsep materialitas dalam pelaporan keberlanjutan

mengacu pada proses identifikasi dan penentuan isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan, serta penting bagi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (GRI, 2021). Dalam praktiknya, proses penentuan isu material tidak selalu mudah karena perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, hingga kinerja ekonomi. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas isu keberlanjutan yang benar-benar relevan, sehingga laporan yang dihasilkan sering kali mencakup terlalu banyak informasi tanpa fokus yang jelas pada isu-isu yang paling penting.

Permasalahan lain yang juga sering muncul dalam laporan keberlanjutan adalah keterbatasan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan. Dalam perspektif teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai kelompok yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, seperti karyawan, masyarakat lokal, pemerintah, dan konsumen (Freeman, 1984). Oleh karena itu, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menentukan isu keberlanjutan yang perlu dilaporkan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perusahaan secara aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi isu material. Dalam beberapa kasus, konsultasi dengan pemangku kepentingan dilakukan secara terbatas atau bahkan hanya bersifat formalitas. Kondisi ini menyebabkan laporan keberlanjutan lebih banyak mencerminkan perspektif internal perusahaan dibandingkan kebutuhan informasi dari pihak eksternal.

Selain itu, ketidakkonsistenan dalam pengungkapan informasi juga menjadi permasalahan substantif yang sering ditemukan dalam laporan keberlanjutan. Meskipun berbagai standar pelaporan keberlanjutan telah dikembangkan, seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan Integrated Reporting Framework, penerapan standar tersebut masih belum sepenuhnya konsisten di berbagai organisasi. Perbedaan dalam metode pengukuran, indikator yang



Akuntansi

- Keberlanjutan

Bab 10

METODE EVALUASI DAN CONTENT ANALYSIS LAPORAN KEBERLANJUTAN

Kerangka Sistematis untuk Evaluasi Laporan

Evaluasi laporan keberlanjutan merupakan langkah penting dalam menilai kualitas pengungkapan informasi yang disampaikan oleh organisasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi alat untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proses evaluasi terhadap laporan keberlanjutan memerlukan suatu kerangka sistematis agar penilaian yang dilakukan dapat berlangsung secara terstruktur, objektif, serta memungkinkan adanya perbandingan antar perusahaan maupun antar periode pelaporan. Kerangka sistematis ini umumnya dibangun berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan yang telah diakui secara internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), serta kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) yang banyak digunakan dalam praktik pelaporan keberlanjutan modern (GRI, 2021; KPMG, 2020).

Tahap pertama dalam kerangka sistematis evaluasi laporan keberlanjutan adalah penentuan tujuan dan lingkup evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi sangat penting karena akan menentukan arah serta fokus analisis yang dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan untuk berbagai kepentingan, seperti menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan keberlanjutan, mengukur tingkat transparansi informasi yang diungkapkan, maupun menilai sejauh mana perusahaan telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnisnya. Dengan adanya tujuan yang jelas, proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Selain itu, lingkup evaluasi juga perlu ditentukan sejak awal agar proses analisis memiliki batasan yang jelas. Lingkup evaluasi dapat mencakup seluruh dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau dapat pula difokuskan pada salah satu aspek tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penentuan lingkup evaluasi juga mencakup periode laporan yang dianalisis serta jenis organisasi yang menjadi objek penelitian sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara konsisten dan relevan (Gray, Adams, & Owen, 2014).

Setelah tujuan dan lingkup evaluasi ditentukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi standar dan indikator yang akan digunakan dalam proses penilaian laporan keberlanjutan. Standar pelaporan keberlanjutan menyediakan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait dampak aktivitasnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian. Salah satu standar yang paling banyak digunakan dalam evaluasi laporan keberlanjutan adalah Global Reporting Initiative (GRI). Standar GRI menyediakan kerangka indikator yang cukup komprehensif dan mencakup berbagai aspek keberlanjutan. Indikator dalam GRI secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Aspek ekonomi berkaitan dengan dampak kegiatan perusahaan terhadap kondisi ekonomi pemangku kepentingan serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Aspek lingkungan mencakup isu-isu seperti penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya alam. Sementara itu, aspek sosial meliputi berbagai



Akuntansi

- Keberlanjutan

Bab 11

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAPORAN ESG

Peran Teknologi Informasi dalam Pelaporan Keberlanjutan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan efisiensi pelaporan keberlanjutan. Dalam konteks pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance), teknologi informasi berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data keberlanjutan secara sistematis dan akurat. Transformasi digital memungkinkan perusahaan mengintegrasikan data keberlanjutan dengan sistem manajemen perusahaan sehingga pelaporan tidak lagi bersifat manual, tetapi berbasis sistem yang terotomatisasi dan real-time. Hal ini menjadikan teknologi informasi sebagai komponen penting dalam mendukung praktik akuntansi keberlanjutan dan pengungkapan ESG yang transparan kepada pemangku kepentingan.

Pelaporan keberlanjutan pada dasarnya merupakan proses penyampaian informasi non-keuangan yang berkaitan dengan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut digunakan oleh investor, regulator, masyarakat, serta

pihak lain untuk menilai komitmen dan kinerja perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya (Elkington, 1998; Burritt & Schaltegger, 2010). Dalam konteks ini, teknologi informasi memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan tersebut dapat dipercaya, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pihak (Junanda, 2024) .

Salah satu peran utama teknologi informasi dalam pelaporan keberlanjutan adalah mendukung proses pengumpulan dan pengelolaan data ESG secara lebih efektif. Perusahaan yang menerapkan sistem informasi keberlanjutan dapat mengumpulkan data terkait emisi karbon, konsumsi energi, penggunaan air, praktik ketenagakerjaan, hingga kebijakan tata kelola perusahaan secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengolahan data secara real-time sehingga manajemen dapat memantau kinerja keberlanjutan secara berkelanjutan dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Teknologi juga memungkinkan visualisasi data dalam bentuk grafik, indikator kinerja, maupun dashboard digital yang memudahkan analisis tren keberlanjutan dari waktu ke waktu.

Selain itu, teknologi informasi juga berperan dalam meningkatkan akurasi dan keandalan data pelaporan keberlanjutan. Salah satu tantangan utama dalam pelaporan ESG adalah memastikan bahwa data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi operasional perusahaan. Penggunaan teknologi seperti analitik data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan sistem manajemen data memungkinkan perusahaan mengolah data dalam jumlah besar secara lebih akurat dibandingkan metode manual. Teknologi AI dapat menganalisis pola data keberlanjutan, memprediksi risiko lingkungan, serta memberikan rekomendasi strategis dalam upaya pencapaian target keberlanjutan perusahaan (Wibowo, 2024).

Di samping itu, teknologi informasi juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG. Dalam era digital, pemangku kepentingan menuntut informasi yang lebih terbuka dan



Akuntansi

- Keberlanjutan

Bab 12

TANTANGAN DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI KEBERLANJUTAN

Tantangan Implementasi Teknologi dalam Pelaporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengkomunikasikan kinerja perusahaan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance/ESG*). Seiring berkembangnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan, organisasi semakin didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data keberlanjutan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengelola data ESG secara lebih sistematis, meningkatkan efisiensi pelaporan, serta memperkuat integrasi antara data keuangan dan non-keuangan. Namun demikian, implementasi teknologi dalam pelaporan keberlanjutan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat teknis, organisatoris, maupun regulatif.

1. Kompleksitas pengelolaan data ESG

Salah satu tantangan utama dalam implementasi teknologi pada pelaporan keberlanjutan adalah kompleksitas pengelolaan data ESG. Data keberlanjutan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data

keuangan tradisional karena bersifat multidimensional dan berasal dari berbagai sumber organisasi. Informasi mengenai emisi karbon, penggunaan energi, dampak sosial, hingga praktik tata kelola perusahaan sering kali tersebar di berbagai unit kerja yang berbeda sehingga menyulitkan proses konsolidasi data secara terintegrasi.

Banyak organisasi mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data ESG yang akurat dan relevan karena metode pengukuran yang belum seragam serta keterbatasan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data tersebut (Gutama, 2024). Ketidakpastian dalam pengukuran dampak lingkungan dan sosial juga menjadi hambatan signifikan dalam proses pelaporan karena organisasi harus memastikan bahwa data yang disajikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, data ESG sering kali bersifat tidak terstruktur dan memerlukan proses transformasi sebelum dapat diolah dalam sistem informasi pelaporan. Hal ini menuntut adanya teknologi analitik yang mampu mengelola berbagai jenis data, termasuk data kualitatif dan indikator keberlanjutan yang kompleks. Tanpa dukungan sistem yang memadai, organisasi akan menghadapi kesulitan dalam menghasilkan laporan keberlanjutan yang konsisten dan kredibel.

2. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi

Tantangan lain yang sering dihadapi organisasi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses pelaporan keberlanjutan. Banyak perusahaan, khususnya di negara berkembang, masih menggunakan sistem pelaporan manual atau semi-digital dalam mengelola data ESG. Ketergantungan pada spreadsheet atau dokumen terpisah menyebabkan proses pengumpulan data menjadi tidak efisien serta rentan terhadap kesalahan manusia.

Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem manual memperlambat proses konsolidasi data dan menyulitkan proses validasi informasi yang diperlukan dalam laporan keberlanjutan. Sistem yang tidak terintegrasi juga membuat organisasi kesulitan

Bab 13

KOMPONEN DAN *DISCLOSURE MAPPING* LAPORAN KEBERLANJUTAN

Komponen Wajib Laporan Keberlanjutan menurut GRI dan ISSB

Laporan keberlanjutan merupakan sarana penting bagi organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dampak kegiatan operasionalnya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada para pemangku kepentingan. Melalui laporan tersebut, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dampak keberlanjutan. Dalam praktik global, penyusunan laporan keberlanjutan umumnya mengacu pada standar internasional yang telah diakui secara luas, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan International Sustainability Standards Board (ISSB). Kedua standar tersebut memberikan pedoman mengenai komponen dan jenis pengungkapan informasi yang perlu disampaikan dalam laporan keberlanjutan sehingga laporan yang dihasilkan memiliki kualitas, konsistensi, serta dapat dibandingkan secara internasional (Unerman, Bebbington, & O'Dwyer, 2010).

Standar GRI merupakan salah satu kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan di berbagai negara.

Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, serta melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas operasionalnya. GRI menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pelaporan keberlanjutan. Dalam perkembangannya, GRI mengembangkan struktur standar yang terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu Universal Standards, Sector Standards, dan Topic Standards.

Universal Standards merupakan komponen dasar yang wajib digunakan oleh semua organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI. Standar ini memberikan pedoman mengenai informasi dasar yang harus diungkapkan oleh perusahaan agar laporan keberlanjutan dapat dipahami secara komprehensif oleh para pemangku kepentingan. Dalam Universal Standards, organisasi diwajibkan untuk mengungkapkan profil organisasi, termasuk identitas perusahaan, struktur organisasi, lokasi operasional, serta jenis produk atau layanan yang dihasilkan. Informasi tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai konteks organisasi yang menyusun laporan keberlanjutan.

Selain itu, Universal Standards juga mengharuskan perusahaan untuk menjelaskan strategi keberlanjutan yang diterapkan. Dalam bagian ini biasanya disampaikan pernyataan dari pimpinan organisasi mengenai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi isu keberlanjutan di masa depan. Penjelasan mengenai strategi keberlanjutan memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai bagaimana perusahaan memandang pentingnya aspek keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya.

Komponen lain yang menjadi bagian dari Universal Standards adalah pengungkapan mengenai etika dan integritas organisasi. Perusahaan perlu menjelaskan nilai-nilai dasar, prinsip etika, serta sistem tata kelola yang digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab. Pengungkapan ini penting untuk menunjukkan bahwa organisasi memiliki



Akuntansi

- Keberlanjutan



Bab 14

PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BERBASIS STANDAR GLOBAL

Penyusunan Laporan secara Sistematis dan Terstruktur

Penyusunan laporan keberlanjutan berbasis standar global memerlukan proses yang sistematis, terstruktur, serta berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap praktik pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan laporan harus dilakukan melalui tahapan yang jelas agar informasi yang disajikan dapat dipahami secara komprehensif oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan yang disusun secara sistematis akan membantu organisasi dalam menggambarkan dampak kegiatan operasional terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (GRI, 2021).

Dalam praktik pelaporan keberlanjutan modern, organisasi umumnya menggunakan kerangka atau standar pelaporan global sebagai pedoman dalam penyusunan laporan. Salah satu standar yang paling banyak

digunakan adalah Global Reporting Initiative (GRI) yang menyediakan panduan bagi organisasi dalam mengungkapkan dampak aktivitas bisnis terhadap berbagai isu keberlanjutan secara sistematis dan terstruktur. Standar ini membantu perusahaan dalam menyajikan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial secara konsisten sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan standar global juga memungkinkan adanya keterbandingan informasi antar organisasi, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja keberlanjutan suatu perusahaan secara lebih objektif.

Tahap awal dalam penyusunan laporan keberlanjutan secara sistematis dimulai dengan proses perencanaan pelaporan. Pada tahap ini organisasi menentukan tujuan pelaporan, cakupan laporan, serta standar yang akan digunakan sebagai pedoman. Perencanaan yang matang sangat penting karena akan menentukan arah serta fokus informasi yang akan disampaikan dalam laporan. Organisasi juga perlu menentukan periode pelaporan, unit operasional yang tercakup dalam laporan, serta indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian keberlanjutan. Menurut penelitian mengenai praktik pelaporan keberlanjutan, tahap perencanaan yang jelas akan membantu organisasi dalam menyusun laporan yang lebih terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Ferrarez et al., 2020).

Setelah tahap perencanaan dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi terhadap para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas organisasi atau pihak yang terdampak oleh kegiatan perusahaan, seperti karyawan, investor, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, serta organisasi non-pemerintah. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi sangat penting karena laporan yang disusun harus mencerminkan kebutuhan informasi mereka. Proses identifikasi ini biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, forum konsultasi, maupun diskusi kelompok terarah. Melalui



Daftar Pustaka

- Abeysekera, I. (2022). A framework for sustainability reporting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(6), 1386-1409.
- Abhayawansa, S., Adams, C. and Neesham, C. (2021), "Accountability and governance in pursuit of Sustainable Development Goals: conceptualising how governments create value", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 34 No. 4, pp. 923-945.
- Adams, C. A. (2017). Conceptualising the contemporary corporate value creation process. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(4), 906-931.
- Al-Shaer, H., Albitar, K., & Hussainey, K. (2022). Creating sustainability reports that matter: an investigation of factors behind the narratives. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(3), 738-763.
- Bais, B. (2024). Global Reporting Initiative: Literature review and research directions. *Journal of Cleaner Production*.
- Bakarich, K. M., Castonguay, J. J., & O'Brien, P. E. (2020). The use of blockchains to enhance sustainability reporting and assurance. *Accounting Perspectives*, 19(4), 389-412.

- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (2014). *Sustainability accounting and accountability* (2nd ed.). London: Routledge.
- Boiral, O., & Heras-Saizarbitoria, I. (2020). Sustainability reporting assurance: creating stakeholder accountability through hyperreality? *Journal of Cleaner Production*, 243, 118596.
- Bryson, J. M. (2004). *What to do when stakeholders matter*. Public Management Review.
- Buhr, N., Gray, R., & Milne, M. J. (2014). Histories, rationales, voluntary standards and future prospects for sustainability reporting: CSR, GRI, IIRC and beyond. In *Sustainability accounting and accountability* (pp. 51-71). Routledge.
- Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2014). *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management*.
- Channuntapipat, C. (2021). Can sustainability report assurance be a collaborative practice? *Business Strategy and the Environment*.
- Cho, C. H., & Patten, D. M. (2007). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy. *Accounting, Organizations and Society*.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing corporate social performance. *Academy of Management Review*.
- De Villiers, C. (2022). The Global Reporting Initiative's (GRI) past, present and future.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Deegan, C. (2014). An overview of legitimacy theory as applied within the social and environmental accounting literature. *Sustainability accounting and accountability*, 248-272.
- Deegan, C., & Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental news objectively? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.

- Delmas, M., & Burbano, V. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*.
- Dhaliwal, D., Li, O., Tsang, A., & Yang, Y. (2011). Voluntary nonfinancial disclosure. *The Accounting Review*.
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited. *American Sociological Review*.
- Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). The investor revolution. *Harvard Business Review*.
- Eccles, R. G., & Krzus, M. P. (2010). *One report: Integrated reporting for a sustainable strategy*. John Wiley & Sons.
- Eccles, R. G., & Krzus, M. P. (2018). *The Nordic model: An analysis of leading practices in ESG disclosure*. Cambridge, MA: Nordic Council of Ministers.
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Freshfields Bruckhaus Deringer. (2023). *A comparison of global sustainability disclosure standards*.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance. *Journal of Sustainable Finance & Investment*.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*.
- Global Reporting Initiative & IFRS Foundation. (2024). GRI and IFRS Foundation collaboration to deliver full interoperability that enables seamless sustainability reporting.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). *GRI Standards 2021: Consolidated set of the GRI Standards*. Amsterdam: Global Reporting Initiative.

Akuntansi

• Keberlanjutan

Buku Akuntansi Berkelanjutan membahas konsep akuntansi yang tidak hanya berfokus pada pencatatan keuangan dan laba perusahaan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis. Melalui pendekatan ini, akuntansi dipahami sebagai alat penting untuk menilai sejauh mana suatu organisasi menjalankan tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan. Buku ini menjelaskan bagaimana laporan keuangan dapat dikembangkan menjadi laporan yang lebih komprehensif dengan memasukkan aspek lingkungan, efisiensi sumber daya, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

Selain itu, buku ini menguraikan pentingnya akuntansi berkelanjutan dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih etis, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Pembaca diajak memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan bahasa yang sistematis, buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa, akademisi, praktisi akuntansi, maupun pelaku bisnis yang ingin memahami peran akuntansi dalam membangun organisasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.



INSIGHT
PUSTAKA

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025
● www.insightpustaka.com
☎ 0851-5086-7290

Ekonomi

+17

ISBN: 978-634-7569-89-9



9 786347 569899